

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI
OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA
SURABAYA**

SKRIPSI

Oleh:

Wahyudi Adi Kirawan

NIM. C01214024



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wahyudi Adi Kirawan

NIM : C01214024

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam
Menyelesaikan Perselisihan Antara Suami Istri
oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota
Surabaya

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya
saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 16 Desember 2019

Saya yang menyatakan,



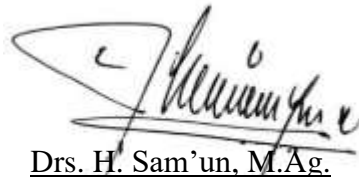
Wahyudi Adi Kirawan

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan NIM. C01214024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 16 Desember 2019

Pembimbing,



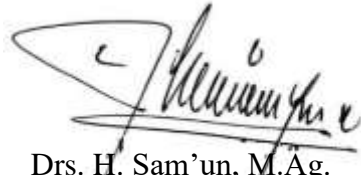
Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Wahyudi Adi Kirawan NIM. C01214024 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I


Drs. H. Sam'un, M.Ag.
NIP. 195908081990011001

Penguji II


Dr. Hj. Suqiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

Penguji III


Dr. Hj. Nurlailatul Musyafa'ah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

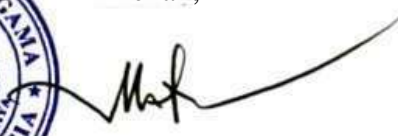
Penguji IV


Dr. Imron Mustofa, M.Ud.
NIP. 198710192019031006

Surabaya, 30 Desember 2019

Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,




Dr. H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Wahyudi Adi Kirawan
NIM : C01214024
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : wahyuadi77k@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN
PERSELISIHAN SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN
RUNKUT KOTA SURABAYA**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Desember 2019
Penulis


(Wahyudi Adi Kirawan)

ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan antara Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya” ini merupakan hasil penelitian lapangan untuk menjawab tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang penulis batasi menjadi dua permasalahan. Pertama, bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Kedua bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

Skripsi ini merupakan penelitian jenis kualitatif dan berupa penelitian lapangan (*field research*), yang mana teknik pengumpulan datanya menggunakan metode wawancara dan observasi. Setelah itu dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dengan pola pikir deduktif. Data yang dikumpulkan berupa proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri dan faktor yang mempengaruhi kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, khususnya kegiatan mediasi yang penulis himpun dari wawancara, dan buku-buku yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 dalam hal pelaksanaan mediasi tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4. Adapun tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya, faktor pendukung meliputi; faktor ekonomis dan faktor pelayanan yang cepat dan optimal. Adapun faktor penghambatnya meliputi; para pihak ingin menang sendiri, konflik yang berkepanjangan, fasilitas dan sarana, kurangnya staf yang bekerja dan para pihak tidak ingin dipertemukan dalam mediasi.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka disarankan bagi Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4 seperti bimbingan perkawinan maupun mediasi, dan bagi pasangan suami istri yang berselisih hingga dapat menyebabkan perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian perselisihan.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Kajian Pustaka	9
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Hasil Penelitian	12
G. Definisi Operasional	13
H. Metode Penelitian	15
I. Sistematika Pembahasan	22
BAB II LANDASAN TEORI MEDIASI	25
A. Pengertian Mediasi dan Dasar Hukumnya	25
1. Pengertian Mediasi	25
2. Dasar Hukum Mediasi	27
B. Ruang Lingkup Mediasi	32
C. Peran dan Fungsi Mediator	35
D. Proses Mediasi	39
E. Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri	45
F. Manfaat Mediasi.....	47

BAB III	GAMBARAN UMUM DAN PENERAPAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KEMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA	50
	A. BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	50
	1. Sejarah Singkat BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	50
	2. Struktur Organisasi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	54
	3. Visi dan Misi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	55
	4. Tugas Pokok BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	57
	5. Data Nikah dan Cerai KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	59
	6. Fasilitas Pendukung BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	59
	B. Mediasi Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	60
BAB IV	ANALISIS PELAKSANAAN MEDIASI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA	70
	A. Analisis Pelaksanaan Mediasi dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya	70
	B. Tingkat Keberhasilan Mediasi serta Faktor yang Mempengaruhinya	75
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran	81
	DAFTAR PUSTAKA	82

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang sangat sakral dan kuat untuk mematuhi perintah dari Allah SWT. Setiap manusia berupaya mempertahankan hidupnya melalui proses regenerasi, melalui hal tersebut maka terjadilah proses perkawinan. Islam menganugerahi keabsahan dalam jalinan antara dua manusia yang berbeda jenis kelamin melalui proses akad nikah yang biasa disebut ijab qabul.¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selain itu, Islam juga menyarankan agar laki-laki dan perempuan melaksanakan perkawinan untuk menjalankan separuh ibadah kepada-Nya selama hidup di dunia. Banyaknya keistimewaan yang ada, Islam menempatkan hakekat perkawinan sebagai sesuatu yang memiliki kedudukan tinggi.² Pernikahan dalam Islam juga menjadi fasilitas untuk menciptakan sebuah keluarga yang berbahagia, nyaman, sejahtera serta penuh adanya kasih dan sayang. Pernikahan dapat menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam

¹ Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syariat Islam* (Jakarta: PT. Rinekab Cipta, 1996), 1.

² Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung di Antara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT. Golden Terayon Press, 1994), 1.

perceraian dengan cara perdamaian, salah satunya dengan melakukan mediasi.⁵

Cara penyelesaian perselisihan melalui jalur damai dengan mediasi memiliki peluang yang besar untuk berkembang di Indonesia. Cara mediasi dipilih karena meminimalisir potensi terjadinya perselisihan yang mungkin terjadi. Asas kekeluargaan dan kerukunan yang tetap dipertahankan membuat masyarakat lebih memilih cara mediasi agar tetap terjalin sebuah hubungan silaturahmi antar keluarga daripada keuntungan sesaat apabila terjadi perselisihan.⁶

Mediasi merupakan salah satu alat yang efektif dalam menyelesaikan sebuah perselisihan maupun sengketa, artinya mediasi mempunyai banyak manfaat dan keuntungan apabila digunakan sebagai alternatif penyelesaian perselisihan.⁷ Hal-hal yang menjadi manfaat dan keuntungan apabila menggunakan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa yaitu, perselisihan dapat diselesaikan secara *win-win solution*, waktu yang digunakan juga tidak berbelarut-larut, biaya yang dikeluarkan lebih murah, tetap terpeliharanya hubungan antara individu satu dengan yang lain dan terhindarkannya pemasalahan mereka dari publikasi yang secara berlebihan.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dalam
 konsideran huruf a tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah disebutkan

⁵ Said Agil Husein al-Munawar, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 107.

⁶ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 4.

⁷ Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 47.

Mediasi memberikan banyak manfaat kepada pihak yang berselisih, selain itu mediasi juga memberikan manfaat yang nyata dalam dunia peradilan. Pertama, mediasi yang dilakukan dapat mengurangi jumlah perkara yang banyak di pengadilan. Banyaknya perkara yang diselesaikan dengan cara mediasi, dapat dengan sendirinya mengurangi perkara yang diputuskan hakim. Kedua, dengan sedikitnya perkara yang telah masuk akan mempermudah upaya pengontrolan di pengadilan apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan dalam pemeriksaan suatu perkara. Ketiga, pemeriksaan perkara di pengadilan dapat berjalan dengan cepat karena sedikitnya jumlah perkara yang masuk di pengadilan.⁹

⁹ Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesai Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 79.

Peraturan Menteri Agama No. 3 Tahun 1975 Pasal 28 ayat (3) menjelaskan bahwa “Pengadilan Agama dalam berusaha mendamaikan kedua belah pihak dapat meminta bantuan kepada Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) agar menasehati kedua suami istri tersebut untuk hidup makmur lagi dalam rumah tangga”. Dengan demikian BP4 memiliki peranan yang sangat penting dalam wilayah-wilayah kecamatan di Indonesia.¹¹

BP4 dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap teguh melaksanakan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan peraturan perundang-undangan

¹¹ Nofri Yendra, "Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pra Nikah", *Jurnal Bimas Islam*, No. 1, Vol. 6 (2013), 61.

1. Memberikan bimbingan kepada masyarakat, terkait penasehatan dalam hal nikah, cerai, talak dan rujuk.
2. Memberikan bimbingan yang berkaitan dengan keluarga yang telah dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Memberikan bantuan berupa advokasi dan mediasi bagi para pihak yang berselisih dalam menyelesaikan perkara di pengadilan Agama.
4. Mengurangi sebab-sebab yang dapat memicu adanya perceraian, tidak bertanggung jawabnya melakukan poligami serta pernikahan yang tidak dicatat dan pernikahan di bawah umur yang berada dalam lingkungan masyarakat
5. Bekerjasama dengan instansi, lembaga dan organisasi yang terkait dalam hal kesamaan tujuan baik di dalam maupun di luar negeri.
6. Menerbitkan dan menyebarluaskan majalah perkawinan dan keluarga, buku, brosur dan media elektronik kepada masyarakat yang dianggap perlu guna mengedukasi masyarakat.¹³

¹³ Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) Provinsi DKI Jakarta, *Membina Keluarga Sakinah* (Jakarta: 2009), 51.

Keadaan yang sama juga terjadi di wilayah kecamatan Rungkut. Dari informasi yang penulis dapatkan, keluarga yang memiliki masalah dalam hubungan rumah tangganya mempunyai solusi yang berbeda dalam menyelesaikan masalahnya. Pihak yang berkeinginan untuk bercerai tidak mau meminta bantuan BP4 dalam mengatasi masalahnya dan cenderung menyelesaikan perkaranya ke Pengadilan, sedangkan pihak yang berusaha mempertahankan rumah tangganya ingin permasalahan tersebut diselesaikan melalui mediasi oleh BP4. Sehingga patut diuraikan faktor-faktor yang menyebabkan BP4 kurang optimal dalam menyelesaikan peselisihan suami istri

¹⁵ Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Metode penyelesaian perselisihan atau sengketa secara damai.
2. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Manfaat mediasi.
4. Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami dan istri.
5. Tingkat keberhasilan fungsi mediasi yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
6. Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat keberhasilan fungsi mediasi yang telah dilaksanakan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya .

1. Analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

C. Rumusan Masalah

Beralaskan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya ?
2. Bagaimana tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti lain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti dan digunakan sebagai bahan acuan dalam penelitian yang akan dilakukan. Penelitian yang telah lampau digunakan agar memudahkan dalam pengkajian masalah sehingga tidak akan ada pengulangan materi dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

Dalam penelitian yang telah lewat, penulis mengutip hasil penelitian yang memiliki konektivitas dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian tersebut diantaranya adalah:

- ¹⁸ Fitrizal Widya Pangesti, *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”* (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013).

[illegible]

Adapun tujuan yang dapat dicapai dan dijabarkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
2. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan mediasi dan mencari faktor-faktor yang mempengaruhinya di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya serta mencari solusinya.

Dari tujuan yang telah dijelaskan diatas, peneliti berharap dalam skripsi ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

- [illegible]

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran kepada seluruh masyarakat agar tidak mengabaikan konsep dan peran mediasi dalam menyelesaikan masalah sengketa atau perselisihan.

Agar tidak terjadi kesalahpahaman diperlukan adanya definisi operasional guna memperjelas arah pembahasan masalah terhadap pokok bahasan dalam judul penelitian ini “Analisis Pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 Di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya” yaitu:

- [illegible]

- ²⁰ Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 900.

Metode penelitian merupakan suatu upaya untuk memudahkan seorang peneliti agar dapat melakukan sebuah penelitian dengan baik, yang bertujuan untuk mewujudkan penelitian yang bermutu dan berkualitas. Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, teknik, alat, serta desain penelitian yang digunakan.²¹ Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana metode deskriptif adalah metode yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu permasalahan dan bertujuan untuk membuat suatu gambaran secara sistematis tentang fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang dikaji.²² Agar penelitian dapat tersusun dengan sistematis maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti akan menggunakan jenis penelitian berupa penelitian lapangan (*field research*) yang meneliti tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Makna

²² Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 7.

dari penelitian lapangan yaitu suatu jenis penelitian yang dilaksanakan ditengah-tengah obyek penelitian guna memperoleh data secara jelas.²³

2. Data yang dikumpulkan

Dalam penelitian ini peneliti telah mengumpulkan data yang berdasarkan rumusan masalah, yaitu:

- a. Data mengenai proses mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri.
- b. Data tentang kegiatan dalam mengatasi perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.
- c. Data mengenai tingkat keberhasilan dan faktor yang mempengaruhi kegiatan BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, khususnya kegiatan mediasi.

3. Sumber Data

Sumber Data merupakan sumber dari mana asal data yang akan dicari, baik primer maupun sekunder. Sumber tersebut dapat berupa orang, dokumen, pustaka, barang, keadaan, maupun yang lainnya.²⁴ Jenis data yang akan dipakai dalam penelitian ini yaitu data kualitatif, artinya data yang dipakai tidak berbentuk angka.²⁵ Selaras dengan jenis data yang dipakai dalam penelitian ini, maka sumber data yang dibutuhkan dan digunakan adalah:

²³ Bisri Mustofa, *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis* (Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009), 3.

²⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014), 9.

²⁵ J. Supranto, *Metode Riset Aplikasinya dalam Pemasaran* (Jakarta: PT. Rieneka Cipta, 2003), 20.

a. Observasi

²⁷ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 128.

berikutnya yaitu peneliti memaparkan dan menggambarkan keadaan BP4 yang ada di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam hal mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya kemudian menganalisa data yang diperoleh guna mendapatkan kesimpulan.

Peneliti akan menganalisisnya dengan menggunakan teknik analisa deskriptif, mengenai teknik analisa data yang dipakai penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Teknik analisis deskriptif. Pada analisis data penulis akan mengolah data yang diperoleh dari hasil fakta yang ada di tempat penelitian yaitu data tentang pelaksanaan mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Data tersebut akan diolah oleh penulis dengan cara memaparkan dan menggambarkan keadaan yang ada di lapangan.
- b. Pola pikir deduktif. Deduktif umumnya diartikan sebagai cara menarik kesimpulan dari berbagai hal yang mulanya bersifat umum kemudian dihubungkan pada hal-hal yang khusus. Dengan pola pikir deduktif penulis dapat mempertimbangkan data mengenai pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang telah didapatkan sehingga bisa menyimpulkan jawaban yang tepat dari permasalahan tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang digunakan untuk memudahkan dalam memahami skripsi ini terbagi menjadi lima bagian. Masing-masing bagian tersebut terbagi menjadi bab-bab yang menjelaskan mengenai penjelasan yang berbeda-beda. Di dalam bab-bab tersebut berisi beberapa sub bab yang saling berkaitan, sehingga sistematikanya dapat dijelaskan dalam uraian berikut:

Bab pertama, yakni pada bagian ini menjelaskan mengenai alasan pengambilan masalah yang dijelaskan dalam uraian latar belakang. Dari penjelasan latar belakang tersebut selanjutnya dilakukan tahap identifikasi dan batasan masalah yang digunakan untuk mencegah kemungkinan perluasan masalah yang nantinya akan diteliti dan juga sebagai acuan untuk merumuskan masalah dalam penelitian ini. Selain kedua hal tersebut, pada bagian pertama ini juga berisi kajian pustaka yang digunakan untuk mencegah kesamaan dalam penelitian yang dikaji. Selanjutnya ditentukan tujuan penelitian dan kegunaan hasil penelitian agar jelas apa yang diinginkan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini juga berisi definisi operasional yang digunakan memperjelas pengertian dari masing-masing variabel yang diteliti. Tahap terakhir dari bagian pertama penelitian ini adalah penentuan metode penelitian dan sistematika pembahasan yang dijadikan sebagai panduan dalam mengumpulkan, menganalisis, membahas dan menyimpulkan data dari penelitian yang dilakukan dan dalam penulisannya nanti memerlukan sistematika pembahasan agar penelitian ini bisa disajikan secara sistematis.

Bab kedua, pada bab ini memuat tentang landasan teori yang akan membahas tentang mediasi yang akan meliputi pengertian mediasi dan dasar hukum mediasi, ruang lingkup mediasi, peran dan fungsi mediator, proses mediasi, mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri serta manfaat menggunakan mediasi.

Bab ketiga, bab ini akan menggambarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti. Yakni data penelitian tentang pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan antara suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya. Pembahasan terdiri dari gambaran umum yang didalamnya terdapat profil BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, yang mencakup sejarah singkat, struktur organisasi, visi-misi, tugas pokok, fasilitas pendukung BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, serta data tentang mediasi perselisihan suami istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya.

Bab keempat, bab analisis data merupakan bab yang digunakan oleh penulis dalam menganalisis data. Yakni hasil dalam penelitian yang dipaparkan pada bab tiga sebelumnya, kemudian dianalisis menggunakan landasan atau dasar teori yang terdapat pada bab dua. Pada bab ini memaparkan tentang analisis pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perselisihan suami istri oleh BP4 KUA Kec. Rungkut Kota Surabaya dan tingkat keberhasilan mediasi serta faktor yang mempengaruhinya.

Bab kelima, penutup yang akan memuat kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan di dalam bab ini merupakan kristalisasi dari hasil analisis

BAB II

LANDASAN TEORI MEDIASI

1. Pengertian Mediasi

Secara etimologi, istilah mediasi berasal dari bahasa latin, yaitu *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang dijalankan pihak ketiga sebagai mediator yakni menjadi penengah serta berusaha menyelesaikan masalah dari pihak yang berkonflik. “Berada di tengah” juga berarti menjadi mediator yang harus selalu berada pada posisi yang netral dan tidak memihak pihak manapun dalam menyelesaikan permasalahan.¹

Menurut Joni Emirzon dalam bukunya, kata mediasi berasal dari bahasa Inggris, *mediation* yang berarti penyelesaian sengketa yang mengikutsertakan pihak ketiga sebagai penengah, sedangkan pihak yang menengahnya dinamakan mediator atau orang yang menjadi penengah.²

Secara umum dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud mediasi merupakan proses yang melibatkan pihak ketiga dalam usaha penyelesaian suatu perselisihan yang berpeeraan sebagai penasihat.³

Sedangkan Kamus Hukum Indonesia memberikan penjelasan lain

¹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Cet.I (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009), 1-2.

² Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase)* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001). 69.

³ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 640.

Kata mediasi dalam bahasa arab, dikenal dengan istilah perdamaian yakni berasal dari kata **الصلح** yang merupakan bentuk masdar dari kata **صَلَحَ - يَصْلُحُ - صَلَاحًا** yang memiliki arti memutuskan suatu sengketa antara dua pihak. Sedangkan menurut *syara'* adalah suatu akad yang bermaksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan sebuah sengketa antara dua pihak yang berkonflik.⁵ Mohammad Anwar menjelaskan makna perdamaian (**الصلح**) secara *lughat* adalah memutuskan pertentangan. Sedangkan menurut istilah adalah sebuah usaha untuk mencapai perjanjian guna mendamaikan pihak-pihak yang berkonflik.⁶

Sedangkan dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016 Pasal 1 angka (1) memberikan penjelasan mengenai mediasi, yakni “upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan melaksanakan proses mediasi untuk mendapatkan kesepakatan dari para pihak yang berkonflik dengan bantuan dari mediator”.⁷

Rachmadi Usman memberikan penjelasan juga terkait mediasi yakni, upaya menyelesaikan sengketa dengan cara perundingan yang

⁵ Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer (Arab-Indonesia)* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 118.

⁶ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), 487.

7 Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI. 3.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian tersebut, memberikan pengertian yang sama tentang Mediasi yaitu upaya penyelesaian sengketa dengan cara menghadirkan pihak ketiga atau mediator yang tugasnya adalah menjadi seorang penengah yang bersifat netral dan akan memberikan solusi sampai perundingan dengan pihak-pihak yang bersengketa merasa tidak dirugikan.

Praktik mediasi atau bisa disebut dengan perdamaian (الصُلْح) sudah dilaksanakan pada zaman Nabi Muhammad SAW dalam berbagai macam bentuk. Praktek tersebut dilakukan untuk mendamaikan pasangan suami istri yang sedang bertengkar, mendamaikan kaum muslim dengan

[illegible]

Peraturan Perundang-undangan seperti dalam Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama menyebutkan dasar hukum mediasi,¹⁴ yang berbunyi: “(1) Dalam sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, Hakim berupaya mendamaikan kedua pihak yang berkonflik. (4). Selama memutuskan perkara, maka terlebih dahulu dilakukan usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan”.

¹³ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam...*, 495.

[illegible]

Mediasi sebagai salah satu cara penyelesaian sengketa memiliki ruang lingkup utama, yaitu berupa wilayah privat/perdata. Ruang lingkup mediasi

¹⁸ Mohammad Taufik Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata...*, 63.

Upaya penyelesaian sengketa melalui jalan mediasi bisa dilaksanakan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan di pengadilan adalah bagian dari proses hukum yang berjalan di pengadilan, sedangkan mediasi yang berlangsung di luar pengadilan adalah bagian tersendiri yang sudah terlepas dari prosedur yang harus dijalankan pada hukum acara di pengadilan.²⁰

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia menegaskan ruang lingkup sengketa yang bisa diselesaikan dengan cara mediasi. Dalam melakukan mediasi UU No. 30 Tahun 2000 pasal 6 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa “Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada iktikad baik dengan menyampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”. Ketentuan

²⁰ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan* (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010), 20.

1. Kehadiran mediator harus diterima dan disetujui oleh pihak-pihak yang berperkara;
2. Mediator tidak memiliki ikatan keluarga atau sedarah dengan salah satu pihak yang berperkara;
3. Mediator tidak memiliki relasi pekerjaan atau bisnis dengan salah satu pihak yang berperkara;
4. Mediator tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain terhadap perjanjian dari para pihak yang bersengketa; dan
5. Mediator tidak mempunyai kepentingan terhadap jalannya perundingan maupun hasil yang diputuskan nantinya.

Mediator memiliki peran yang sangat penting dalam tercapainya kesepakatan damai diantara pihak-pihak yang bersengketa. Menurut Gery Goodpaster sebagaimana dikutip oleh D.Y. Witanto, menyebutkan bahwa mediator mempunyai beberapa peranan penting antara lain:²⁹

²⁹ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan* (Bandung: Alfabeta, 2010), 102.

Dari penjelasan tersebut dapat dimaknai bahwa keberadaan mediator sangat dibutuhkan dalam proses mediasi untuk memperoleh kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Selain peran yang telah dipaparkan tersebut, Fuller juga menegaskan bahwa mediator juga mempunyai beberapa fungsi penting lainnya yakni:³⁰

1. Sebagai katalisator, yaitu membuat suasana menjadi lebih kondusif yang semula terjadi pertentangan menuju ke arah kondisi dan suasana yang kooperatif dalam sebuah forum.

[illegible]

2. Sebagai pendidik, yaitu mediator harus mampu memberikan nasehat dan petunjuk agar bisa mendapatkan solusi yang terbaik untuk semua pihak yang berperkara.
3. Sebagai penerjemah, yaitu memberikan terjemahan terkait konsep yang ingin dilaksanakan dan ingin ditawarkan oleh pihak-pihak yang berperkara.
4. Sebagai narasumber, yaitu mediator harus bisa menggunakan manfaat-manfaat dari sumber informasi yang telah didapatkan.
5. Sebagai penetralisir informasi negatif, yaitu menetralsir masalah dari informasi-informasi yang mungkin memiliki efek negatif, menyulut emosi serta memperkeruh keadaan.
6. Sebagai agen realitas, yaitu mewadahi semua informasi yang diterima baik berupa keluhan, tuduhan ataupun pernyataan dan selanjutnya menyampaikan informasi tersebut kepada pihak lawan menggunakan bahasa yang baik dan tidak bersifat provokatif.
7. Sebagai kambing hitam, yaitu mediator harus senantiasa siap untuk menerima berbagai pernyataan yang bersifat menolak ataupun ketidakpuasan pihak-pihak yang bersengketa berkaitan dengan tawaran solusi yang telah diberikan.

Dengan demikian peranan dan fungsi seorang mediator dalam usaha mencari solusi dalam menyelesaikan perkara perdata yang diperiksanya melalui jalan damai merupakan hal sangat penting. Putusan perdamaian

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses mediasi dikarenakan para pihak telah berkumpul dan telah siap mengikuti mediasi. Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh mediator maupun para pihak, antara lain; salam perkenalan beserta sambutan dari mediator, pemaparan permasalahan yang dilakukan oleh para pihak, mengurutkan dan melakukan penjernihan masalah, berdiskusi dan menciptakan beberapa solusi-solusi yang terbaik, menemukan kesepakatan oleh para pihak dan merumuskan hasil keputusan, yang terakhir penutup mediasi.

Pada tahapan akhir ini, para pihak hanyalah melakukan hasil yang telah disepakati dalam proses mediasi. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati bersama dilakukan sendiri oleh para pihak, namun tidak menutup kemungkinan para pihak meminta bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan, agar kesepakatan yang telah disepakati tidak diselewengkan oleh para pihak yang berselisih.³³

[illegible]

tercapai sebuah kesepakatan damai antara kedua belah pihak. Namun sebaliknya apabila dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik maka dapat menyebabkan kegagalan dalam mediasi. Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam proses mediasi memiliki tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan pramediasi

Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan. Kemudian ketua pengadilan akan menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa perkaranya. Kewajiban melakukan mediasi timbul jika pada hari persidangan pertama para pihak hadir. Majelis Hakim menyampaikan kepada penggugat dan tergugat prosedur mediasi yang wajib mereka jalankan.

Setelah menjelaskan prosedur mediasi, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memilih mediator dalam daftar mediator yang terpampang di ruang tunggu kantor pengadilan. Para pihak boleh memilih mediator sendiri dengan syarat mediator tersebut telah memiliki sertifikat mediator. Bila dalam waktu 2 (dua) hari para pihak tidak dapat menentukan mediator, Majelis Hakim akan menunjuk hakim pengadilan di luar Hakim Pemeriksa Perkara yang bersertifikat. Namun jika tidak ada hakim yang bersertifikat, salah satu anggota Hakim Pemeriksa Perkara yang ditunjuk oleh Ketua Majelis wajib menjalankan fungsi mediator.

Dalam waktu 5 (lima) hari setelah para pihak menunjuk mediator yang disepakati atau setelah para pihak gagal memilih mediator, para pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim.³⁴

Dalam forum dilakukan pertemuan bersama untuk berdialog, mediator dapat meminta agar pertemuan dihadiri langsung oleh pihak yang bersengketa dan tidak diwakili oleh kuasa hukum. Dalam forum tersebut, mediator menampung aspirasi, membimbing serta menciptakan hubungan dan kepercayaan para pihak.

3. Pendalaman masalah

Cara mediator mendalami permasalahan adalah dengan cara kaukus,³⁵ mengolah data dan mengembangkan informasi, melakukan eksplorasi kepentingan para pihak, memberikan penilaian terhadap kepentingan yang telah diinventarisir, dan akhirnya menggiring para pihak pada proses tawar menawar penyelesaian masalah.

³⁴ Resume perkara adalah dokumen yang dibuat oleh tiap pihak yang memuat duduk perkara dan atau usulan penyelesaian sengketa. Lihat pasal 1 angka 10 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

³⁵ Kaukus adalah pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Lihat Pasal 1 angka 4 PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kaukus dilakukan agar para pihak dapat memberikan informasi kepada mediator lebih luas dan rinci yang mungkin tidak disampaikan disaat bertemu dengan pihak lawan.

6. Keterlibatan ahli dalam proses mediasi

Biaya untuk mendatangkan seorang ahli ditanggung oleh para pihak berdasarkan kesepakatan. Namun Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak menjelaskan

Proses mediasi dinyatakan berakhir dengan 2 (dua) bentuk. Pertama, mediasi berhasil dengan menghasilkan butir-butir kesepakatan di antara para pihak, proses perdamaian tersebut akan ditindaklanjuti dengan pengukuhan kesepakatan damai menjadi akta perdamaian yang mengandung kekuatan seperti layaknya Putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap. Kedua, proses mediasi menemukan jalan buntu dan berakhir dengan kegagalan. Proses mediasi di pengadilan yang gagal akan dilanjutkan di sidang pengadilan.

Para pihak atas dasar kesepakatan bersama, dapat menempuh upaya perdamaian terhadap perkara yang sedang dalam proses banding, kasasi, atau peninjauan kembali atau terhadap perkara yang sedang diperiksa pada tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali sepanjang perkara itu belum diputus.

Dalam menyelesaikan perkara perselisihan suami istri, kewajiban untuk mendapatkan kesepakatan damai dari para pihak bersifat imperatif, sehingga usaha untuk memperoleh kesepakatan damai harus dilaksanakan dengan serius

Hal ini sama dengan firman Allah dalam Surah *al-Nisa'* ayat 35, yang berbunyi:³⁹

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang *hakam* dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang *hakam* itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik

³⁷ Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 197 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 22 ayat (2).

³⁸ Merupakan Perselisihan yang meruncing antara suami isteri yang diselesaikan oleh dua orang juru damai (*hakam*). Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum...*, 184.

[illegible]

Sebagai metode penyelesaian perselisihan secara damai, mediasi dapat menjadi senjata ampuh untuk memberikan solusi terhadap masalah sengketa

[illegible]

atau perselisihan. Para pihak yang bersengketa dapat dengan mudah memperoleh kesepakatan, akibatnya mediasi akan sangat bermanfaat oleh kedua belah pihak. Meskipun dalam mediasi yang gagal dan belum ada kesepakatan yang diperoleh, proses mediasi yang telah berlangsung sebelumnya tetap memberikan manfaat dalam mengklarifikasi masalah dan mempersempit perselisihan. Dengan keadaan tersebut maka para pihak yang bersengketa mampu memutuskan masalahnya sesuai dengan apa yang mereka kehendaki dan terima.⁴¹

Mediasi merupakan salah satu alat yang efektif serta memiliki banyak manfaat dan keuntungan dalam upaya penyelesaian masalah ataupun sengketa.⁴² Sebagaimana umumnya keunggulan dan manfaat mediasi yang dapat memberikan beberapa solusi penyelesaian antara lain, yaitu:⁴³

1. Mediasi memberikan manfaat menyelesaikan sengketa atau perselisihan dengan cara yang cepat dan pengeluaran biaya yang relatif murah dibandingkan mengusung perselisihan tersebut ke pengadilan.
2. Mediasi membantu para pihak-pihak yang bersengketa agar selalu berpartisipasi secara langsung dan secara informal guna menyelesaikan perselisihan mereka.
3. Memberikan para pihak kapasitas untuk melakukan sebuah kontrol terhadap proses dan hasilnya mediasi.

⁴¹ Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Yudisial di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2012), 20.

⁴² Munir Fuady, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000), 47.

⁴³ Gatot P. Soemartono, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006), 139.

Kecuali manfaat yang telah disebutkan diatas, mediasi memberikan keuntungan yang nyata karena prosesnya dapat dilakukan dengan cepat, terjadinya kerukunan dan tidak terputusnya silaturahmi, biaya yang ditimbulkan relatif tidak mahal, lebih memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak dan juga memberikan hasil yang baik dalam menyelesaikan sebuah masalah tanpa adanya masalah yang baru.⁴⁴

[illegible]

**GAMBARAN UMUM DAN PELAKSANAAN MEDIASI DALAM
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN ANTARA SUAMI ISTRI OLEH BP4 DI
KUA KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA**

1. Sejarah Singkat BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) yang berada di KUA Rungkut telah berdiri pada tanggal 1 Oktober 1954 yakni saat Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut Surabaya berdiri, dan pada mulanya merupakan pembaharuan (pecahan) dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonocolo yakni sebelum tahun 1954. Setelah itu pada tahun 1994 KUA Rungkut berganti tempat ke Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya, yang akhirnya merupakan gedung milik sendiri.¹

50

Sejak berdiri pada tanggal 1 oktober 1994, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut telah mengalami perubahan dan beberapa kali pergantian Kepala sebagai berikut:

Tabel 3.1

Data Periododesasi Kepala KUA Kecamatan
Rungkut Kota Surabaya

NO	N A M A	PERIODE
1	KH. M. Toha	1954-1975
2	H. M. Nurchozin	1975-1978
3	Moch. Subechi	1978-1983
4	Drs. Imam syafaat	1983-1987
5	H. Ismail AR. S. Ag	1987-1993
6	H. Badrun nadjad	1993-1998
7	Drs. H. Mudhofir	1998-2003
8	Drs. Marfa'i	2003-2008
9	Drs. H. Nurhasan. M.Ag	2008- 2011
10	Drs. Ridwan	2010-2011
11	Drs. Suardi, L	2012-2014
12	H. Ahmad Tholhah, M.Ag	2014-Sekarang

BP4 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rungkut dalam melaksanakan tupoksi mewilayahi 6 Kelurahan, yaitu:

- Kelurahan Rungkut Kidul
- Kelurahan Kali Rungkut
- Kelurahan Medokan Ayu
- Kelurahan Kedung Baruk
- Kelurahan Penjaringan Sari
- Kelurahan Wonorejo

Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Rungkut terletak di Jl. Rungkut Asri Utara I/04 Surabaya dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Bagian Utara : Wilayah Kecamatan Sukolilo
2. Bagian Selatan : Wilayah Kecamatan Gunung Anyar
3. Bagian Timur : Selat Madura
4. Bagian Barat : Wilayah Kecamatan Tenggilis

Kecamatan Rungkut memiliki penduduk yang berjumlah sekitar 85.050 jiwa dengan berbagai macam kondisi baik dari kondisi sosial,

ekonomi, dan budaya. Keadaan masyarakat di Kota Surabaya sangat bervariasi baik dalam hal agama, budaya, keturunan maupun pekerjaan, sehingga memungkinkan terjadinya percampuran budaya yang berasal dari penduduk asli maupun penduduk pendatang.

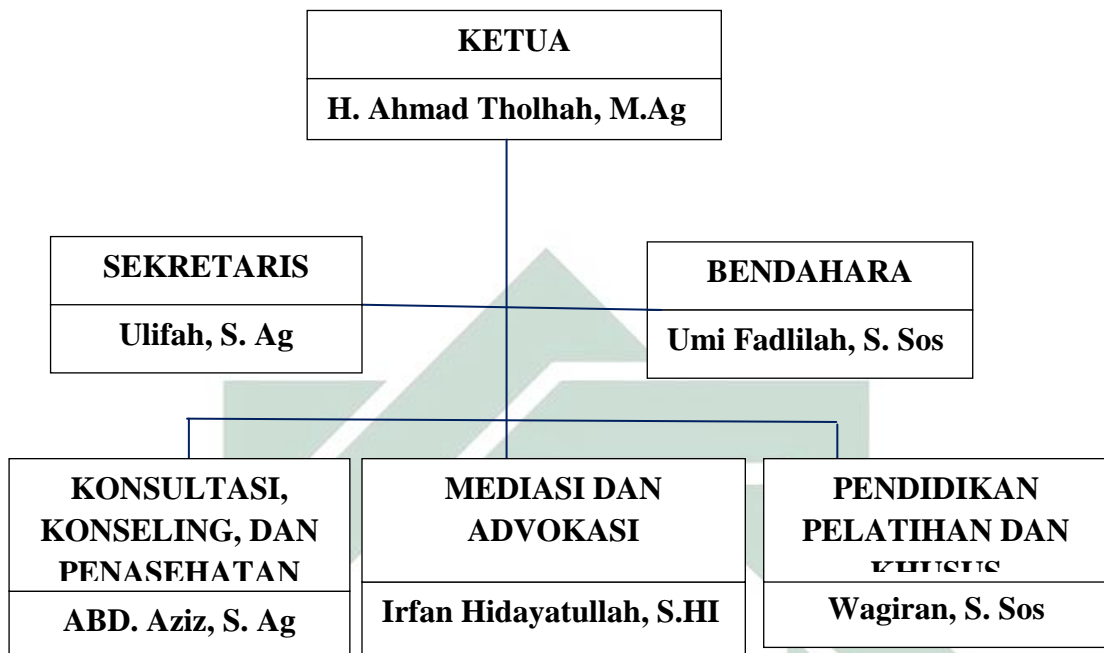
Dilihat dari segi sosiologisnya, penduduk Kecamatan Rungkut dipisahkan menjadi beberapa golongan berdasarkan segi sosial ekonominya. Golongan-golongan tersebut terdiri dari golongan pertama yakni golongan menengah keatas yang kebanyakan bertempat tinggal di wilayah Penjaringan Sari. Golongan kedua terdiri dari masyarakat yang berada pada golongan menengah yakni sebagian besar penduduk Kecamatan Rungkut sendiri. Golongan ketiga terdiri dari masyarakat yang berada pada tingkat ekonomi kelas bawah. Golongan ini merupakan golongan yang jumlahnya berada pada urutan kedua setelah golongan menengah yang jumlahnya paling banyak dan juga merupakan kondisi ekonomi yang banyak dialami oleh masyarakat Kecamatan Rungkut karena tersebar hampir di semua kelurahan.

Tingkatan kelas-kelas dalam segi agama yang ada di Kecamatan Rungkut dibedakan menjadi tiga golongan, yakni sebagian masyarakat yang berstatus santri yaitu orang-orang yang memiliki adat istiadat dan budaya seperti model masyarakat pondok sebagaimana biasanya. Golongan kedua yakni masyarakat abangan yang memiliki kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan santri yang bersifat agamis. Meskipun demikian, antusiasme dalam mengikuti kegiatan keagamaan di

Berdasarkan gambaran-gambaran kondisi yang terjadi di wilayah KUA Kecamatan Rungkut tersebut dalam segi sosial, ekonomi dan agama maka kondisi tersebut bisa dijadikan pisau analisis untuk lebih mengerti dan memahami gambaran kehidupan keluarga dalam konteks kriteria keluarga yang sakinah, maka masyarakat Kecamatan Rungkut mayoritas dalam kelompok keluarga sakinah I dan II dan sebagian kecil dalam kelompok keluarga sakinah III plus.

Struktur organisasi dalam lembaga merupakan gambaran umum dari adanya suatu organisasi yang menjadi ujung tombak dari sebuah perjalanan dalam suatu program ataupun kegiatan yang menjadi landasan dalam rangka mencapai tujuan, maka dari itu kepengurusan haruslah memiliki personalia yang tepat guna mewakili dari berbagai aspek dan keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi.

[illegible]



3. Visi dan Misi KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Visi Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut adalah:
 “Profesional dan amanah dalam membina keluarga sakinah”. Adapun
 penjabaran terhadap visi tersebut adalah:

- a. Profesional

Suatu sikap, tindakan dan kebijakan yang dilaksanakan atau diambil berdasarkan prinsip-prinsip standart pelayanan dan hukum yang berlaku.

- b. Amanah

Melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh negara sesuai dengan tugas dan kewenangannya dengan berpedoman pada prinsip kejujuran, dapat dipercaya dan memiliki nilai akuntabilitas yang tinggi.

Badan Penasehat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di KUA Kecamatan Rungkut mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi pemerintah yakni Departemen Agama dibidang pembangunan agama di Kecamatan, khususnya di bidang urusan agama Islam. Berbicara mengenai tugas pokok BP4, terlebih dahulu kita ketahui tentang tujuan dan usaha BP4 yang secara formil dirumuskan untuk mempertinggi nilai perkawinan dan terwujudnya rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut tuntunan Islam. Hal ini sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di Pasal 5 AD BP4, yang berbunyi:²

”Tujuan BP4 adalah mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga *sakinah* menurut ajaran Islam untuk mencapai masyarakat dan bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera materil dan spiritual”.

Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada Pasal 5 Anggaran Dasar BP4 mempunyai tugas pokok dan usaha sebagai berikut:³

- a. Memberikan bimbingan dan penasehatan serta penerangan mengenai nikah, talak, cerai dan rujuk kepada masyarakat baik perorangan maupun kelompok.

² BP4 Pusat, *Hasil Musyawarah Nasional ke XII dan Pengukuhan Nasional Keluarga Sakinah*, (Jakarta: BP4 Pusat, 2001), 94.

[illegible]

Peristiwa nikah dan cerai yang terjadi di KUA Kecamatan Rungkut setiap tahunnya tergolong sangat sedang, adapun data nikah dan cerai yang tercatat pada tahun 2018-2019 di KUA Kecamatan Semampir adalah sebagai berikut:

Guna menunjang kenyamanan dan kepuasan pelayanan BP4, maka KUA Kecamatan Rungkut juga menyediakan berbagai ruangan, yaitu: halaman parkir yang luas dan asri, ruang tunggu yang nyaman, ruang Kepala KUA, ruang PPAI, Balai Nikah, ruang staf, Gudang, serta kamar kecil dan WC.

[illegible]

Dalam melakukan proses mediasi, BP4 sendiri tidak pernah mematok biaya untuk para pihak yang berselisih, oleh sebab itu besarnya biaya yang dikeluarkan atas dasar sukarela.⁶ Menurut masyarakat sekitar yaitu Musdalifah mengatakan biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga relatif murah dibandingkan di pengadilan, hal ini sesuai dengan masyarakat sekitar yang ekonominya menengah ke bawah.⁷

Dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pelestarian perkawinan (khususnya untuk menjaga mutu perkawinan), BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berupaya semaksimal mungkin, ini dapat

⁶ Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018

⁷ Musdalifah, *Wawancara*, Surabaya, 1 Mei 2019.

Adapun waktu yang disediakan untuk melakukan kegiatan seperti bimbingan hingga mediasi kepada para pihak yang berselisih yaitu selama jam kerja dari hari senin sampai hari jum'at mulai pukul 08.00–16.00. Dalam hal ini pihak BP4 bersedia dan terbuka untuk menerima pasangan yang berselisih datang ke kantor.¹¹

Dalam melaksanakan kegiatan, BP4 memiliki para staf yang bekerja mulai dari Kepala hingga para staf yang lain total ada 6 orang sedangkan staf yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang. Agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik, para staf disana telah membagi tugas-tugas dan tanggung jawab masing-masing, mulai dari tugas Kepala hingga para staf yang lain, semua telah dibagi dengan porsi masing-masing agar pelaksanaan kegiatan tetap dapat berjalan dengan baik walaupun kekurangan staf. Setiap wewenang yang dimandatkan kepada staf telah dilakukan dengan

¹¹ Ulifah, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

memanfaatkan mediasi sebagai budaya bangsa dan leluhur untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah agar tercapai keseimbangan dalam tatanan hidup bermasyarakat.

Selanjutnya yaitu cara BP4 dalam meredam emosi dan menguasai pikiran para pihak diantaranya:

1. Memahami karakter dari para pihak yang terkait atau sifat yang dimiliki oleh pihak yang berselisih, mediator jika mampu memahami sifat-sifat yang dimiliki oleh pihak yang bersangkutan, dalam hal ini bila mediator tidak mampu memahami pihak-pihak yang terkait persoalan, maka sudah dipastikan mediasi akan berjalan alot dan cenderung kearah negatif.
2. Menggunakan dasar hukum dalam memberikan nasihat dan solusi terbaik yang ditawarkan agar menumbuhkan wibawa dan solusi yang diberikan dapat diterima dengan penuh keyakinan.
3. Mediator harus berperan aktif dan menunjukan sikap yang profesional walupun mediasi yang berlangsung dalam kondisi yang tidak baik, mediator jangan terbawa suasana oleh para pihak yang dapat menjadikan emosi dan bila mediator juga terbawa suasana selama berlangsungnya medias sehingga mengakibatkan emosi, maka persoalan akan menjadi rumit.¹⁴

Adapun kesulitan-kesulitan yang dihadapi BP4 di KUA Kecamatan Rungkut dalam melakukan mediasi, menurut Irfan Hidayatullah yaitu:¹⁵

¹⁴ Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

¹⁵ Irfan Hidayatullah, Staf di KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

¹⁶ Eva, *Wawancara*, Surabaya, 17 April 2019.

Adapun kategori permasalahan yang sering ditangani oleh BP4 sangatlah bermacam-macam, mulai dari masalah KDRT, perselingkuhan, perekonomian keluarga, dan lain-lain. Oleh sebab itu, dalam menangani perselisihan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian, perlu dilakukan sebuah upaya oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut yakni memberikan nasihat dan menawarkan solusi-solusi dari permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan bersama, Menurut bapak Abd. Aziz, upaya yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut adalah:¹⁸

1. Memahami terlebih dahulu permasalahan yang dihadapi oleh klien serta hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian.
2. Memastikan klien dan kesungguhannya untuk bercerai maupun tidak.
3. Memberikan senggang waktu kepada klien untuk memikirkan kembali tentang permasalahan yang dihadapi klien serta resiko yang akan ditanggung.
4. Memanggil pasangan untuk diajak bicara bersama.

¹⁸ Abd. Aziz, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

A. Analisis Pelaksanaan Mediasi Dalam Menyelesaikan Perselisihan Suami Istri oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya

Dalam upaya menyelesaikan perselisihan suami istri, kewajiban untuk mendapatkan kesepakatan damai dari para pihak bersifat imperatif, sehingga usaha untuk memperoleh kesepakatan damai harus dilaksanakan dengan serius dan maksimal, oleh karena itu perlu dilakukan sebuah upaya mediasi terhadap perselisihan suami istri.

¹ Rachmadi Usman, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan* (Bandung: PT Aditya Bakri, 2003), 82.

juga dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya dalam menyelesaikan perselisihan suami istri, selain bimbingan, upaya mediasi juga dilakukan agar mencapai tujuan dari BP4 itu sendiri yakni mempertinggi mutu atau kualitas perkawinan menurut ajaran agama islam.

Ada beberapa metode bagi BP4 Kecamatan Rungkut dalam menyelesaikan perselisihan suami istri yang pertama adalah memberikan bimbingan dan penasehatan, dan kedua adalah memberikan bantuan mediasi. Dalam hal mediasi, proses yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, berbeda dengan pengadilan yang mana mediasi wajib dilakukan oleh lembaga peradilan merujuk pada PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Oleh sebab itu dalam prosedur pelaksanaannya tidak ada perencanaan yang jelas dan ketentuan khusus yang mengaturnya dalam artian tidak mengikuti syarat-syarat mediasi secara formal seperti proses mediasi di Pengadilan.

Berdasarkan pemaparan pada bab II mengenai pelaksanaan proses mediasi, terdapat 3 (tiga) tahapan dalam pelaksanaan mediasi, tahapan tersebut yang akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis tentang pelaksanaan mediasi oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut. Pertama adalah tahapan pramediasi. Kedua adalah tahapan pelaksanaan mediasi. Ketiga

Tahap awal dari mediasi yang mana mediator melakukan penyusunan terhadap langkah-langkah dalam upaya mendamaikan para pihak dan mempersiapkan segala hal sebelum mediasi benar-benar siap dilaksanakan. Pada tahap ini merupakan tahapan yang sangat penting, karena akan menentukan jalannya mediasi yang akan dilakukan.

Menurut Abd. Aziz, sebelum melakukan mediasi kepada parah pihak yang bersangkutan, BP4 KUA Kecamatan Rungkut melakukan tahapan sebagai berikut:³

- a. Memahami persoalan yang dihadapi oleh pihak yang memiliki permasalahan dalam rumah tangganya terlebih dahulu serta hal-hal yang dapat mempengaruhi terjadinya perceraian.
- b. Memastikan para pihak dan kesungguhannya dalam melakukan perceraian, apabila para pihak bersungguh-sungguh ingin bercerai maka BP4 perlu memberikan penasehatan hingga memediasi para pihak.

² Ronal S. Kraybill Dkk, *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006), 63.

³ Abd. Aziz, Staf KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

- c. Memberikan leenggang waktu bagi para pihak agar meninjau kembali tentang permasalahan yang dihadapi para pihak serta resiko yang akan ditanggung.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penasehatan atau pembinaan perkawinan, BP4 KUA Kecamatan Rungkut telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pelaksanaan mediasi terlebih pada tahapan sebelum memediasi para pihak yang bersangkutan, tujuannya adalah agar permasalahan yang terjadi dalam perselisihan suami istri dapat segera diselesaikan tanpa harus melalui pengadilan.⁴

2. Tahapan pelaksanaan mediasi

Tahapan ini merupakan tahapan penting dalam proses mediasi dikarenakan para pihak telah berkumpul dan telah siap mengikuti mediasi. Pada tahapan ini, terdapat beberapa langkah-langkah yang dilakukan oleh BP4 Kecamatan Rungkut sebagai mediator maupun para pihak. Pertama adalah salam perkenalan beserta sambutan yang dilakukan oleh mediator agar dapat menciptakan suasana yang baik dan kondusif saat mediasi dilaksanakan. Kedua adalah mediator menanyakan permasalahan yang terkait oleh para pihak kemudian para pihak melakukan pemaparan terhadap permasalahan yang sedang diperselisihkan. Ketiga adalah mengurutkan dan melakukan penjernihan masalah, berdiskusi dan menciptakan beberapa solusi-solusi yang terbaik, menemukan kesepakatan

⁴ Ahmad Tholhah, Kepala KUA Rungkut, *Wawancara*, Surabaya, 17 Mei 2018.

Pada tahapan akhir ini, para pihak hanyalah melakukan hasil yang telah disepakati dalam proses mediasi kemudian melakukan pengawasan sekaligus mengevaluasi dari hasil upaya yang telah ditempuh dalam memberikan bantuan mediasi kepada keluarga yang bersangkutan. Umumnya, pelaksanaan hasil mediasi yang telah disepakati bersama dilakukan sendiri oleh para pihak, namun tidak menutup kemungkinan para pihak meminta bantuan pihak lain untuk mewujudkan kesepakatan, agar kesepakatan yang telah disepakati tidak diselewengkan oleh para pihak yang berselisih.

[illegible]

Untuk mengetahui hasil kegiatan mediasi yang dilakukan oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut dalam mengatasi perselisihan antara suami istri, menurut keterangan bapak Irfan Hidayatullah yaitu kategori permasalahan yang sering ditangani oleh BP4 sangatlah bermacam-macam, mulai dari masalah KDRT, perselingkuhan, perekonomian keluarga, dan lain-lain.⁵ Oleh sebab itu, dalam menangani perselisihan suami istri yang dapat mengakibatkan perceraian, perlu dilakukan sebuah upaya oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut yakni memberikan nasihat dan menawarkan solusi-solusi dari permasalahan agar dapat mencapai kesepakatan bersama.

Dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 menurut data yang terdapat pada bab III hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama, padahal dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir terdapat kurang lebih 420 peristiwa nikah dan terdapat kurang lebih 100 peristiwa cerai di Kecamatan Rungkut Kota

[illegible]

Berbeda halnya di Pengadilan Agama yang mana kasus perkara yang masuk sangat banyak, ini dikarenakan cakupan wilayah yang dinaungi Pengadilan Agama lebih besar dibandingkan dengan KUA yang cakupan wilayahnya hanya sekecamatan. Maka dapat diketahui bahwa kasus perselisihan antara suami istri yang berhasil dimediasi oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut Surabaya selama tahun 2018 ada 18 pasang dari 25 pasang, sedangkan pada tahun 2019 ada 14 pasang dari semua kasus perselisihan yang masuk di KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yaitu 19 pasang.

Sedangkan keberhasilan atau kegagalan mediasi sangatlah dipengaruhi oleh faktor-faktor pendukung dan penghambat selama proses berjalannya mediasi. Berikut faktor-faktor pendukung keberhasilan mediasi oleh BP4 KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya:

1. Faktor pelayanan yang cepat dan optimal

Menurut staf BP4 tata cara dalam melayani masyarakat yang memiliki permasalahan rumah tangga sangatlah mudah dan sederhana, yakni pihak yang bersangkutan datang ke BP4 dan memberikan keterangan terkait permasalahannya, setelah itu BP4 akan memberikan pelayanan berupa bimbingan hingga mediasi kepada para pihak.

2. Faktor ekonomi

1. Faktor kurangnya kesadaran masyarakat terkait BP4

2. Faktor para pihak ingin menang sendiri

Permasalahan akan menjadi sangat sulit dicari solusi terbaiknya apabila para pihak tetap kuat dalam berpendapat terhadap keinginannya

masing-masing dan tidak mau mendengarkan masukan lain melainkan pendapatnya sendiri.

3. Faktor konflik yang berkepanjangan

Konflik yang terjadi diantara para pihak sudah terjadi berlarut-larut dan belum menemukan solusi terbaik, dan saat mediasi para pihak tidak dapat diredam emosinya karena konflik berkepanjangan, sehingga para pihak tidak dapat menerima lagi masukan-masukan dari mediator dan merasa benar sendiri. Bahkan, sering terjadi pihak sudah tidak bisa saling memaafkan sehingga sulit untuk rukun lagi.

4. Faktor fasilitas dan sarana

dalam hal sarana guna menunjang kenyamanan para pihak juga dinilai masih kurang ideal, karena disana hanya memiliki 2 ruangan yang ukurannya kecil yang digunakan untuk melayani masyarakat dan ruang tunggu yang hanya ada di depan kantor KUA.

5. Faktor kurangnya staf yang bekerja

BP4 dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat masih kurang optimal dikarenakan staf yang dimiliki hanya berjumlah 6 orang saja, sedangkan staf yang menangani masalah perselisihan hanya 3 orang.

6. Para pihak tidak mau dipertemukan dalam proses mediasi

Para pihak tidak mau dipertemukan dalam proses mediasi, melainkan hanya mengutus keluarga atau orang kepercayaannya saja, hal semacam ini akan sulit diselesaikan dalam mediasi karena mediasi

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan keterangan yang telah dipaparkan dari awal pembahasan sampai akhir dapat ditemukan hasil penelitian terkait penelitian ini melalui poin-poin, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh BP4 di KUA Kecamatan Rungkut sangat berbeda dengan proses mediasi yang berjalan pada umumnya di Pengadilan, karena pada dasarnya mediasi tidak dilakukan oleh BP4, lembaga tersebut hanyalah sebuah lembaga penasehatan perkawinan, merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan. Namun upaya yang telah dilakukan BP4 dalam hal pelaksanaan mediasi tidak dibarengi oleh kesadaran masyarakat sekitar, khususnya keluarga yang berselisih dikarenakan masyarakat kurang mengetahui adanya BP4, yang mereka ketahui hanyalah KUA semata.
2. Tingkat keberhasilan mediasi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terakhir yaitu terhitung sejak Tahun 2018 sampai Tahun 2019 hanya ada 44 kasus yang dimediasi dari masyarakat Kecamatan Rungkut dan 12 kasus perkara yang akhirnya dibawa ke Pengadilan Agama. Sedangkan faktor yang mempengaruhinya, faktor pendukung meliputi; faktor ekonomis dan faktor pelayanan yang cepat dan optimal. Adapun faktor penghambatnya

meliputi; kurangnya kesadaran masyarakat sekitar terkait BP4, para pihak ingin menang sendiri, konflik yang berkepanjangan, fasilitas dan sarana, kurangnya staf yang bekerja dan para pihak tidak ingin dipertemukan dalam mediasi.

B. Saran

Dalam bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait:sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang menaungi Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Penasihat, Pembinaan dan Pelestarian Pernikahan (BP4), diharapkan adanya penambahan kegiatan sosialisasi terkait upaya menyelesaikan perselisihan suami istri agar masyarakat sekitar lebih mengetahui dan sadar mengenai kegiatan yang dilakukan BP4 seperti bimbingan perkawinan maupun mediasi.
2. Kepada pasangan suami istri yang berselisih hingga dapat menyebabkan perceraian, hendaknya mengikuti kegiatan yang telah dilakukan oleh BP4 terkait dengan penyelesaian perselisihan. Hal ini dikarenakan agar pasangan suami yang berselisih dapat meminimalisir permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya.

- Hidayatulloh. “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”. Skripsi-- UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2011.
- Keputusan Hasil Munas BP4 ke XIV Tahun 2009 Tentang AD/ART.
- Kraybill, Ronal S Dkk. *Panduan Mediator Terampil Membangun Perdamaian*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2006.
- Kurniawan, Agung. *Transformasi pelayanan public*. Yogyakarta: Pembaharuan, 2005.
- Mahkamah Agung RI, PERMA RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan MA RI.
- Makarao, Mohammad Taufik. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000.
- Marbun, B.N. *Kamus Hukum Indonesia*. Cet.I. Jakarta: Sinar Harapan, 2006.
- Margono, Suyud. *Penyelesaian Sengketa Bisnis Alternative Dispute Resolution (ADR): Teknik dan Strategi dalam Negosiasi, Mediasi dan Arbitrase*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Masruhan. *Metodologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Muhadjir, Noeng. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rake Sarasin, 1989.
- Mustofa, Bisri. *Pedoman Menulis Proposal Penelitian Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Panji Pustaka, 2009.
- Nawawi, Hadari. *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 1933.
- Pangesti, Fitrizal Widya. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Mediasi Perkara Perceraian dan Sidang Keliling di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Brebes”. Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2013.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Rahman, Abdul. *Perkawinan dalam Syariat Islam*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1996.

- Rosikhoh, Desy Yosy. "Pelaksanaan Fungsi BP4 dalam Mengatasi Problematika Perceraian (Penelitian di KUA Astanajapura dan Pangenan)". Skripsi--IAI Syekh Nurjati, Cirebon, 2015.
- Samsuddin. "Strategi Kantor Urusan Agama dalam Menaggulangi Kasus perceraian di Kecamatan Arung keke Kabupaten Jeneponto". Skripsi--UIN Alauddin Makassar, 2002.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Steers, Richard M. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga, 1985.
- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Sujadi F. X. *Penunjang Keberhasilan Proses Manajemen*. Jakarta: CV Masagung, 1990.
- Sujarweni, Wirana. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Sumaryadi. *Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Soemartono, Gatot P. *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam. *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Umam, Khotibul. *Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010.
- Usman, Rachmadi. *Pilihan Penyelesain Sengketa di Luar Pengadilan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- Wijaya, Gunawan. *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Witanto, D.Y, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama Menurut PERMA No. 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*. (Bandung: Alfabeta, 2010.